

PERAN HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN DI DESA SESAOT, NUSA TENGGARA BARAT DAN DESA SETULANG, KALIMANTAN TIMUR

(The Roles of Customary Law in Forest Management and Protection in Sesaot Village, West Nusa Tenggara and Setulang Village, East Kalimantan)

Magdalena¹

¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
Jalan Gunung Batu No.5, Bogor
email: magda.gultom@gmail.com

Diterima 22 Januari 2013, direvisi 1 Mei 2013, disetujui 17 Mei 2013

ABSTRACT

The challenges of forest management and protection In Indonesia often come from local community who live around the forest. However, some studies have argued that customary practices of local community will support sustainable forest management. This research was to study 'how do local people and their customary law protect and manage their forest?' as well as to analyze determinant factors of customary law applied in forest management and protection. The methods used were case study of two villages, that is, Sesaot Village, dominated by Sasak People (West Nusa Tenggara) and Setulang Village, dominated by Dayak Kenyah People (East Kalimantan). Data was collected through field observation and interviews with 30 government officials, 20 NGO staff and 50 villagers. The study found that the existence of customary forest was significant in protecting and sustaining forest management. Factors that determined its sustainability were mainly cohesivity, kinship relationship, the present support of various stakeholders, clear property right as well as financial transparency and accountability.

Keywords: Forest management and protection, local community, customary laws and factors

ABSTRAK

Tantangan pengelolaan dan perlindungan hutan di Indonesia seringkali berasal dari masyarakat lokal sekitar hutan. Sementara itu, beberapa tulisan ilmiah berargumentasi bahwa pengelolaan secara adat oleh masyarakat lokal akan mendukung pengelolaan hutan lestari. Studi ini bertujuan mengkaji cara-cara masyarakat lokal dengan hukum adatnya mengelola dan melindungi hutan serta menganalisa faktor-faktor penentu aplikasi hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Metode yang digunakan berupa studi kasus di dua desa yaitu Desa Sesaot yang didominasi Orang Sasak (Nusa Tenggara Barat) dan Desa Setulang yang didominasi Orang Dayak Kenyah (Kalimantan Timur). Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengamatan lapangan dan wawancara dengan 30 pegawai pemerintah, 20 LSM dan 50 penduduk desa. Penelitian menemukan keberadaan hukum adat masih berperan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan lestari. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah kohesivitas, hubungan kekerabatan, dukungan para pihak terkait, kejelasan hak masyarakat terhadap hutan, transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Kata kunci: Pengelolaan dan perlindungan hutan, masyarakat lokal, hukum adat, faktor-faktor

I. PENDAHULUAN

Tantangan perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia tersebut seringkali datang dari masyarakat lokal di sekitar hutan. Padahal kelestarian pengelolaan hutan sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan. Perambahan, *illegal logging*, pemanfaatan sumberdaya hutan yang tidak lestari, adalah

kegiatan yang tidak mendukung kelestarian hutan.

Masyarakat Indonesia dikenal dengan berbagai adat istiadatnya. Hukum adat tersebut beragam antara yang satu dan yang lain. Pemberlakuan hukum adat juga berlaku dalam pengelolaan hutan. Walaupun tidak dikenal secara formal, beberapa hukum adat telah diberlakukan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan misalnya *Aniq-aniq* di Lombok Barat dan hukum adat masyarakat Dayak

di Kalimantan Timur dalam mengelola hutan adat. Khususnya hukum adat Suku Dayak di Kalimantan Timur sangat berperan dalam mengelola dan melindungi hutan adat (Mulyoutami, *et.al.*, 2009, Kalimantan Timur, Apomfires (1995).

Penunjukkan hutan adat menjadi hutan negara, khususnya sejak disahkannya UU Kehutanan 1967 telah banyak menimbulkan konflik di tengah masyarakat yang berkeberatan hutan adatnya diklaim sebagai hutan negara. Masyarakat lokal berkeinginan memulihkan hak-hak mereka atas hutan adat yang telah ditetapkan sebagai hutan negara. UU Kehutanan Tahun 1967 dianggap telah mengabaikan hak-hak masyarakat setempat, sedangkan Undang-undang Lingkungan Hidup No 5/1990 tidak secara jelas mengatur hak-hak masyarakat lokal untuk mengakses hutan (Sembiring dan Effendi, 1999).

Implementasi otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001 diharapkan akan membuka kemungkinan baru untuk pengakuan tanah adat seperti yang dinyatakan dalam UU No.41/1999 Kehutanan. Namun demikian, peraturan pemerintah yang mengatur hutan adat belum bisa ditetapkan sampai saat ini karena kompleksitas tarik menarik kepentingan dalam proses, khususnya antara Kementerian Kehutanan dan masyarakat setempat yang diwakili oleh LSM. Negara bermaksud untuk menegakkan beberapa pembatasan pada pengakuan resmi tanah adat sementara orang-orang lokal menginginkan tidak ada atau pembatasan minimal (ICRAF dan KPSHK, 2001; ICRAF *et.al.*, 2001).

Situasi ini telah menyebabkan kebuntuan dalam mencapai konsensus antara pihak terkait. Beberapa kekhawatiran terkait kebijakan memberi hak mutlak kepada masyarakat lokal untuk mengelola lahan hutan adalah kemungkinan pembagian tanah dan penjualan, dominasi oleh elit lokal (Contreras-Hermosilla dan C. Fay, 2005). Juga, ada potensi meningkatnya konflik antara masyarakat, sebagian karena wilayah Indonesia pedesaan memiliki komposisi multi etnik (Acciaioli, 2006).

Beberapa peneliti telah melaksanakan studi mengenai potensi hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan lestari.. Salah satunya adalah, studi mengenai kekayaan pengetahuan Masyarakat Dayak di Kalimantan Timur terhadap pemanfaatan tanaman dan ekologi hutan mereka. Mereka juga bersepakat untuk memelihara hutan

bagi generasi mendatang (Mulyoutami, *et.al.*, 2009). Berbeda dengan situasi di Kalimantan Timur, Apomfires (1995) melakukan penelitian bagaimana dampak perubahan insitusi adat terhadap kelestarian hutan di Sentani, Papua. Penelitian dimaksud menemukan bahwa rusaknya hutan di Sentani disebabkan oleh bergesernya dan berubahnya kebudayaan Orang Sentani yang tadinya mengandung kearifan lingkungan.

Seiring dengan maraknya klaim masyarakat adat terhadap hutan, sebuah penelitian tentang klaim hutan dilaksanakan di Luwu, Sulawesi Selatan tahun 2008. Studi ini menemukan bahwa klaim terhadap hutan dapat didasarkan bukti-bukti sejarah, misalnya kuburan, organisasi adat, kegiatan tradisional dalam hutan, serta sebagian masyarakat masih tergantung pada hutan (Gautama, 2008).

Penolakan hak-hak masyarakat lokal maupun adat dalam pengelolaan hutan telah berlangsung hampir 20 tahun. Akhir-akhir ini, walaupun masyarakat adat belum mendapatkan tuntutannya, kebijakan keberpihakan terhadap pengelolaan hutan secara adat semakin menjanjikan. Menteri Kehutanan telah mengeluarkan SK. Menhut No. 251/Kpts-II/1993 tentang ketentuan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat atau anggotanya di areal Hak Pengusahaan Hutan. Ditambah lagi disahkannya SK. No. SE.75/Menhut-II/2004 perihal masalah hukum adat dan tuntutan kompensasi/ganti rugi oleh masyarakat hukum adat. Kebijakan dimaksud sebagai respon atas semakin meningkatnya klaim masyarakat adat terhadap lahan hutan.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu (disebut Para Pemohon) dengan disahkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012. Pemohon telah mengajukan pengujian kesesuaian pasal-pasal dalam UU Kehutanan Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terkait dengan areal hutan negara dalam hutan masyarakat adat. MK mengabulkan sebagian permohonan Pemohon yang dituangkan dalam 12 butir pernyataan. Hal ini merupakan titik terang terhadap perjuangan pengembalian hutan adat kepada masyarakat hukum adat.

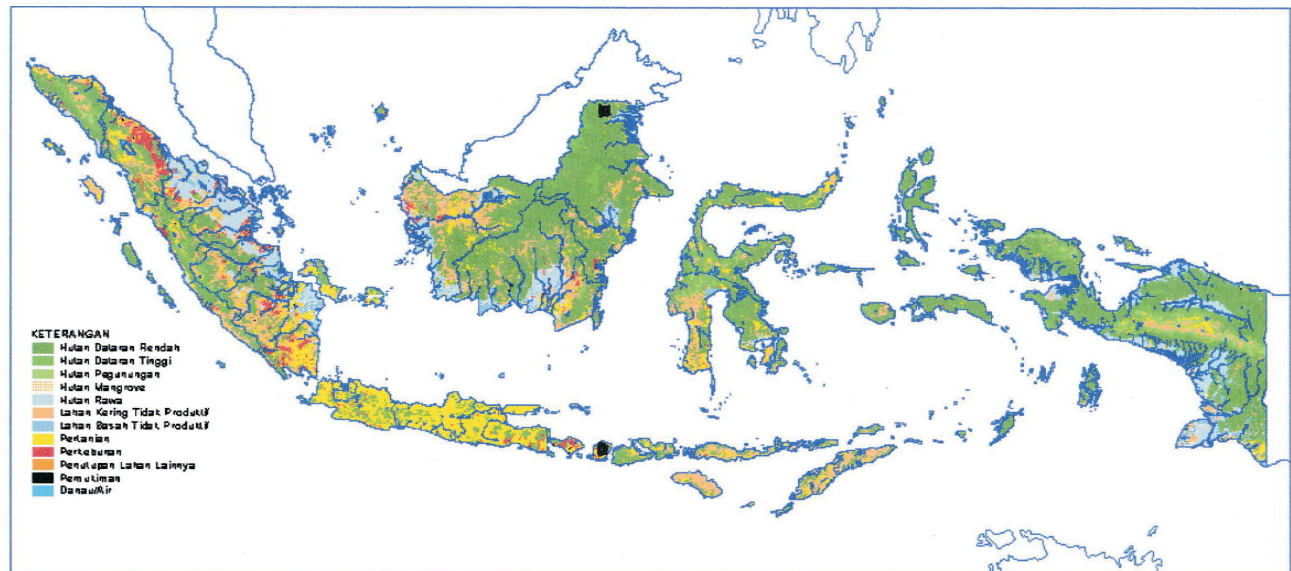
Menanggapi pro dan kontra terhadap pengelolaan secara adat oleh masyarakat lokal, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat lokal dan hukum adatnya mengelola dan melindungi hutan serta faktor faktor yang mempengaruhinya di Desa Sesaot (Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB) dan Desa Setulang (Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur).

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus di dua desa, yaitu Desa Sesaot, Kabupaten Lombok Barat dan Desa Setulang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur (Gambar 1). Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan di lapangan maupun dari hasil menghadiri pertemuan, lokakarya kehutanan di tingkat lokal dan nasional serta data sekunder dari berbagai publikasi.

Wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan metode *snow ball* dilakukan terhadap para pihak terkait yaitu dari Kementerian Kehutanan, Pemda Kabupaten Lombok Barat dan Malinau, elit lokal (Kepala Desa Setulang dan Sesaot, pemangku adat di kedua desa), masyarakat lokal di Desa Sesaot dan Setulang dan LSM (CIFOR-Malinau, Konsepsi-Lombok Barat). Dalam metode *snowball*, orang yang diwawancarai dapat menyebutkan nama lain yang potensial untuk diwawancarai. Total penduduk desa yang terlibat dalam wawancara adalah 50 orang, sedangkan jumlah pegawai pemerintah adalah 30 orang (Staf Pemerintah di Tingkat Propinsi dan Kabupaten) dan jumlah staf LSM adalah 20 orang.

Data dan informasi dianalisis secara deskriptif terhadap pemanfaatan lahan dan hasil hutan maupun konservasi dan perlindungan. Juga dilakukan analisis terhadap para aktor yang terlibat serta faktor-faktor yang memengaruhi aplikasi hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan.



Gambar 1. Lokasi Desa Sesaot dan Setulang

Figure 1. Location of Sesaot dan Setulang Villages

Sumber: Kementerian Kehutanan, 1997

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskusi pada Bab Hasil dan Pembahasan diawali dengan gambaran umum dari profil desa, masyarakat dan hutan terkait dua desa yang merupakan studi kasus penelitian ini. Dilanjutkan dengan uraian mengenai pengalaman aplikasi hukum adat dalam pengelolaan hutan. Selanjutnya

diidentifikasi beberapa faktor-faktor yang bisa mendukung maupun menghambat aplikasi hukum adat dalam mengelola hutan lestari.

A. Gambaran Umum

Masyarakat lokal sekitar hutan umumnya bergantung pada hutan sumber mata pencaharian

mereka. Kehidupan mereka masih jauh dari standar sejahtera dengan fasilitas umum (jalan, kesehatan, listrik) yang kurang memadai.

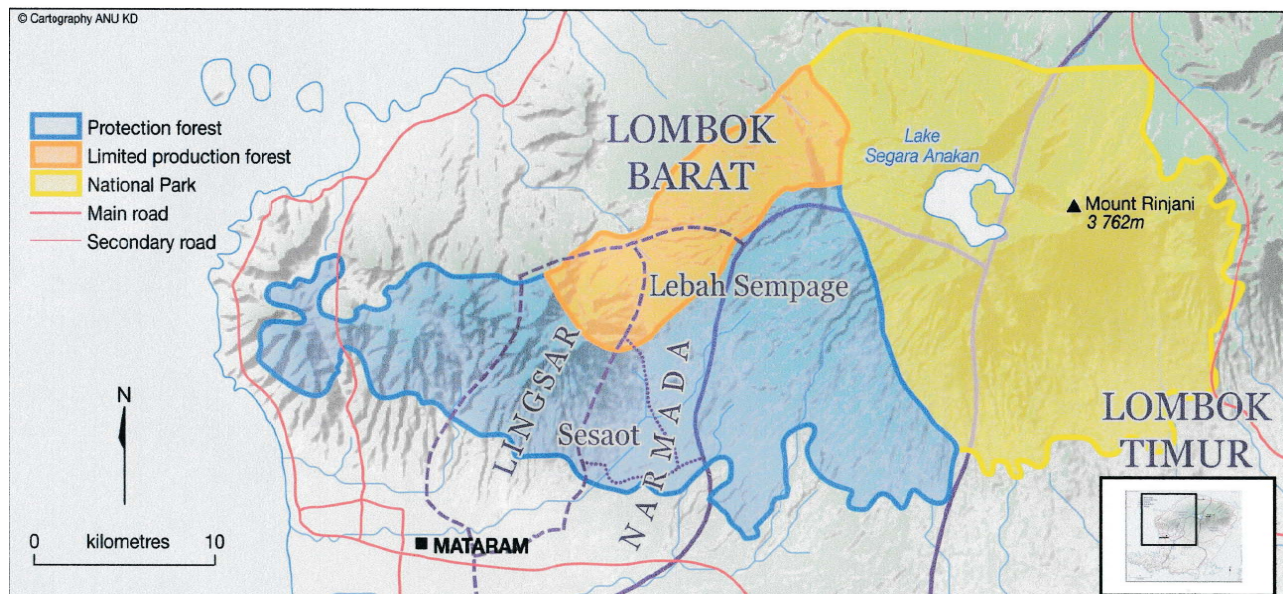
Mayoritas masyarakat lokal Desa Sesaot (berdiri tahun 1968) adalah Orang Sasak (87%) (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2000; Sutedjo dan Suryadi 1997). Orang Sasak telah mendominasi budaya Pulau Lombok sejak 1930-an (Departement Van Economische Zaken, 1935). Mereka tinggal di desa seluas 41.96 km² dengan kepadatan penduduk 181 orang per km² (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2005). Desa mereka terletak 8,3 km dari pusat Kecamatan Narmada (Badan Pusat Statistik Lombok Barat, 2003). Desa Sesaot terdiri dari 10 dusun, tiga dusun berbatasan langsung dengan Hutan Sesaot (Gambar 2 dan 3). Mereka telah akrab dengan program-program pembangunan kehutanan dari Kementerian Kehutanan seperti hutan kemasyarakatan, reboisasi, dan gerhan.

Hutan Sesaot dulunya adalah hutan produksi (Acciaioli, 2006), sehingga masyarakat kehilangan pekerjaan ketika menjadi hutan lindung pada tahun 1982. Selanjutnya pembalakan dihentikan, kegiatan-kegiatan ilegal meningkat. Untuk melindungi hutan dan kebun HKM mereka, masyarakat memberlakukan *Awig-awig*. Beberapa penduduk

telah dipenjarakan selama 6 (enam) bulan hingga satu tahun. Perubahan status hutan telah menimbulkan masalah ekonomi dan sosial di Desa Sesaot.

Di Desa Setulang, mayoritas masyarakatnya adalah Suku Dayak Kenyah yang tinggal di lahan seluas seluas 85 km² (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau, 2006). Dibandingkan dengan Desa Sesaot, Desa Setulang lebih terisolasi dan dicapai dengan ketinting (perahu panjang) dan memiliki kepadatan lebih rendah dari Desa Sesaot. Populasi Desa Setulang adalah 10-16 orang per km² (lebih kecil dari Desa Sesaot), tetapi mereka tidak tersebar merata, dan tinggal berdekatan satu dengan yang lain. Penduduk Desa Setulang lebih homogen dari penduduk Desa Sesaot, dikarenakan mayoritas penduduk Desa Setulang (lebih dari 90%) adalah Suku Dayak Kenyah.

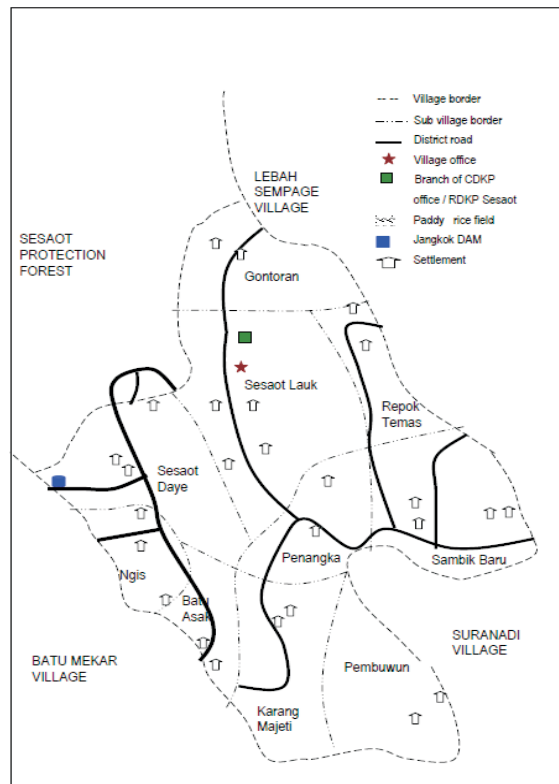
Tidak seperti Masyarakat Sesaot, Masyarakat Setulang memiliki hutan adat seluas 53 km², dan terletak antara garis lintang utara 3° 23' and 3° 29' and antara garis bujur timur 116° 24' and 116° 29' (Sidiyasa, *et.al.*, 2006). Hutan tersebut merupakan bagian hutan lindung disekitar TN Kayan Mentarang. Hutan Adat Setulang berjarak 40 menit dengan ketinting (perahu panjang) dari Desa Setulang (Gambar 4 dan 5).



Gambar 2. Hutan Lindung Sesaot , Lombok Barat

Figure 2. Sesaot Protection Forest, in West Lombok District

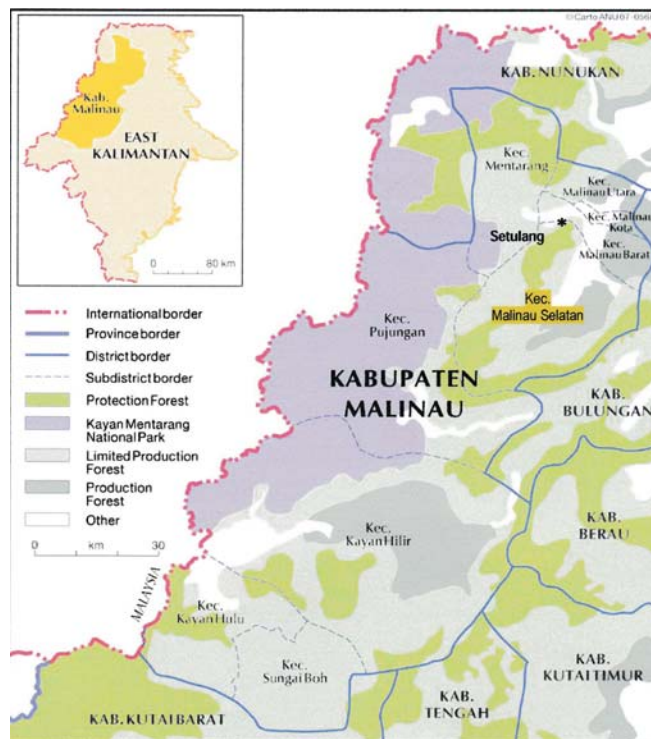
Dipetakan oleh Seksi Kartografi, Research School of Pacific and Asian Studies, ANU



Gambar 3. Sketsa Desa Sesaot dan Hutan Sesaot

Figure 3. Scetch of Sesaot Village and Forest

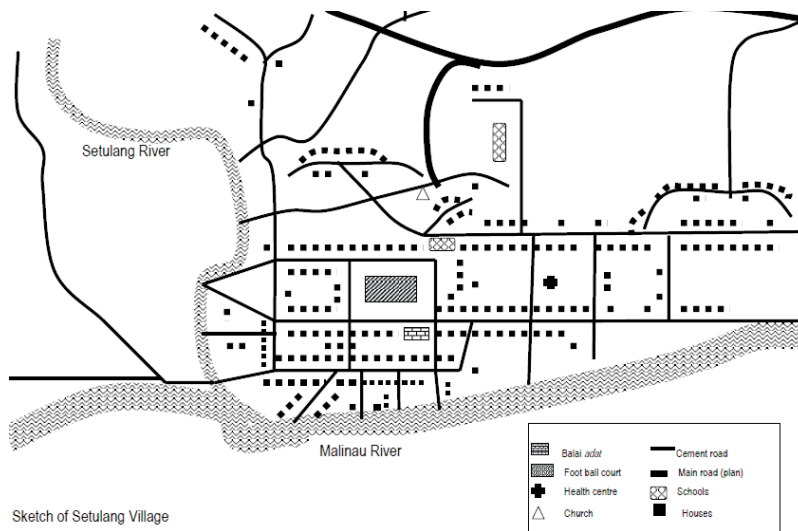
Sumber : Kantor Kelurahan Sesaot, 2006



Gambar 4. Klasifikasi hutan di Kabupaten Malinau, Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan 2000

Figure 4. The classification of forest in Malinau District designated by Ministry of Forestry of Indonesia

Dipetakan oleh Seksi Kartografi, Research School of Pacific and Asian Studies (RSPAS-ANU)



Gambar 5. Sketsa Desa Setulang (Kalimantan Timur)

Figure 5. Scetch of Setulang Village (East Kalimantan)

Sumber: Kantor Kelurahan Setulang dan CIFOR, 2006

B. *Awiq-Awiq* dalam Mengelola dan Melindungi Hutan Sesaot

Sehubungan dengan meningkatnya kegiatan ilegal di Hutan Desa Sesaot, orang Sasak yang telah mengenal Hukum Adat *Awiq-awiq* (asal muasalnya dari Bali), sepakat memberlakukannya pada pertengahan tahun 1990an. (KMPH Sesaot, 2000). Ketika itu, Masyarakat Sesaot difasilitasi oleh LSM lokal dan nasional, yaitu Kelompok Mitra Pelestari Hutan-KMPH; Konsepsi; dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial-LP3ES.

Awiq-awiq diberlakukan untuk melindungi Hutan Sesaot dan kebun masyarakat dari tindakan ilegal (Tabel 1). Saat itu, Desa Sesaot juga pernah dikenal dengan keberhasilan dalam menjalankan program hutan kemasyarakatan (HKM), yang

mengijinkan masyarakat mengelola hutan dengan pola agroforestri. Pemberlakuan *Awiq-awiq* bersifat sukarela dan sangsi tidak berlaku, khususnya untuk orang luar. Pada saat observasi lapangan tidak ditemukan dokumen tertulis *Awiq-awiq*, tetapi informasi mengenai proses pelaksanaannya tertulis di beberapa publikasi dan dapat digali dari hasil wawancara dengan LSM dan masyarakat setempat (Tabel 1).

KMPH (sebuah LSM lokal) dikenal aktif dalam upaya melindungi Hutan Sesaot dengan menggunakan *Awiq-awiq*. LSM ini terdiri dari kelompok-kelompok petani lokal dari daerah sekitar Hutan Sesaot (KMPH Sesaot, 2000). Kelompok tani seperti KMPH terdapat di negara-negara berkembang lainnya. Sebagai contoh, Nuai Neua di Thailand. Nuai Neua didirikan untuk menyatukan para petani di Thailand Utara dalam

Tabel 1. Pemberlakuan *Awiq-awiq* di Desa Sesaot

Table 1. Imposing *Awiq-awiq* in Village

No	Perihal (<i>Subject</i>)	Keterangan (<i>Remark</i>)
1.	Sifat pemberlakuan	Wajib untuk kelompok Masyarakat Sasak. Sukarela, untuk orang luar, jika tertangkap biasanya diserahkan kepada yang berwajib.
2.	Jenis sangsi	Pelanggar (dari dalam) dipermalukan di depan masyarakat dan kemungkinan akan dikucilkan (sangsi bersifat sosial). Untuk orang luar, dilaporkan kepada yang berwajib.
3.	Hal-hal yang diatur	- Melarang kegiatan yang mengganggu areal hutan kemasyarakatan milik petani setempat - Melarang pencurian kayu dari hutan lindung
4.	Cara penetapan hukuman	Melalui pertemuan yang dihadiri KMPH, elit lokal, polisi dan petugas kehutanan. Pertemuan ini akan memutuskan sangsi kepada pelanggar.

memperjuangkan keadilan, ketika lahan masyarakat yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (Ayuthaya, 1996).

Pelaksanaan *Aniq-awiq* memungkinkan opsi, yaitu pertama jika pelaku pelanggaran (misalnya mencuri kayu) adalah anggota HKM maka yang bersangkutan akan diadili di depan masyarakat, pejabat kehutanan dan polisi, untuk diberi sanksi. Kedua, jika pelanggaran dilakukan pihak luar, maka KPMH dan masyarakat akan mengajukan bukti dan melaporkan kepada pihak yang berwenang (sutedjo dan Suryadi, 1997).

Aniq-awiq lebih intensif dilaksanakan ketika meningkatnya kegiatan illegal pada pertengahan tahun 1990 (KMPH Sesaot, 2000). Selama satu tahun (1995-1996), enam belas kasus yang melibatkan gangguan hutan masyarakat dan pencurian kayu dari Kawasan Sesaot dapat diselesaikan oleh masyarakat dan KMPH (Suryadi, 2001).

Ditengah pemberlakuan *Aniq-awiq*, KMPH dan masyarakat mengalami tantangan yaitu pertama, institusi pemerintah terkait merasa terancam dengan munculnya masyarakat yang mengambil patroli dan sanksi terhadap pelanggar hukum; kedua, KMPH dan masyarakat diklaim tidak memiliki otoritas formal untuk menegakkan hukum (Suryadi, 1998).

Bersadarkan wawancara dengan pengurus KMPH, pemerintah provinsi akhirnya tidak setuju dengan cara kerja KMPH dan mereka menyebutnya ilegal. Anggota KMPH menjadi lebih kecewa dengan tuduhan ini apalagi mereka telah me-

ngorbankan hubungan baik mereka dengan tetangga, teman dan kerabat untuk melindungi hutan Mereka juga menyadari bahwa dalam melindungi hutan, mereka menempatkan diri mereka sendiri dan keluarga mereka beresiko. Pelaksanaan hukum adat *Aniq-awiq* akhirnya dihentikan.

Namun demikian, keinginan untuk memberlakukan *Aniq-awiq* kembali muncul tahun 2006, dengan melibatkan lebih banyak petani dari berbagai desa. Untuk itu, masyarakat Sasak harus membangun hubungan baru di tingkat lokal. Hal ini menunjukan *Aniq-awiq* telah mengakar pada kehidupan Orang Sasak di Lombok dan sulit diabaikan. Sayangnya, Hutan Sesaot tidak bisa diselamatkan oleh *Aniq-awiq*. Ketika observasi lapangan dilaksanakan, Hutan Sesaot telah terbuka dan banyak ditanami pisang.

C. Hukum Adat Dayak Kenyah dalam Mengelola dan Melindungi Hutan Setulang

Berbeda dengan Hutan Sesaot, Hutan Setulang masih “perawan” dan belum banyak dijamah oleh program pemerintah pusat maupun daerah, termasuk HKM. Status hutan ini merupakan bagian dari hutan lindung, walaupun dalam sejarahnya hutan ini merupakan hutan adat Suku Dayak Kenyah.

Dalam mengelola hutan, Suku Dayak Kenyah memiliki hukum adat yang awalnya didominasi oleh para bangsawan, namun kini dilakukan oleh sebuah badan yang disebut Badan Pengelola Hutan Tanek Olen Setulang (BPHTOS). Badan inilah

Tabel 2. Pemberlakuan hukum adat di Desa Setulang

Table 2. *Imposing customary law in Setulang Village (Suku Dayak Kenyah)*

No	Butir hukum adat (<i>Point of customary law</i>)	Keterangan (<i>Remark</i>)
1.	Sifat pemberlakuan	Wajib untuk Masyarakat Dayak Kenyah. Tetapi bersifat sukarela untuk orang luar.
2.	Jenis sangsi	Pada prakteknya, tidak ada sangsi jelas buat pelanggar dari luar (perusahaan kayu atau sawit). Biasanya dilakukan penyitaan dan kemudian dilaporkan kepada yang berwajib. Masyarakat Dayak sendiri umumnya sangat mendukung perlindungan hutan adatnya dan jarang kena sangsi
3.	Hal-hal yang diatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemotongan dan penggergajian kayu di hutan. - Larangan bagi perusahaan penebangan kayu mengadakan kegiatan di hutan adat. - Pengaturan terhadap perluasan kebun dalam hutan ada. - Mengatur pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Suku Dayak Kenyah
4.	Cara penetapan hukuman	Melalui pertemuan yang dihadiri oleh BPHTOS, yang terdiri dari pemimpin adat, kepala desa dan masyarakat.

yang mengeluarkan keputusan, ijin memanfaatkan kayu dan sanksi bagi yang melanggar. Pada saat penelitian, hukum adat tersebut telah ditulis (Tabel 2), namun demikian keputusan diambil biasanya melalui musyawarah secara adat.

1. Pengelolaan hutan yang lebih demokratis

Keberadaan Desa Setulang diawali ketika Orang Dayak Kenyah dari Sungai Pujungan memutuskan pindah ke daerah sekitar Sungai Setulang. Desa di sekitar Sungai Setulang sepakat untuk memberi mereka Hutan Setulang untuk menggantikan hutan adat mereka sebelumnya di Sungai Pujungan. Hutan dimaksud dikelola dan digunakan oleh keluarga bangsawan dan rekan-rekan mereka (Eghenter, 2000). Pemimpin adat pada saat itu memiliki kekuatan yang dominan dalam proses pengambilan keputusan tentang hutan.

Namun demikian, kekuatan dominan itu berakhir ketika pemerintah pusat mengeluarkan UU No 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada tahun 1989, orang non-aristokrat pertama kali menjadi kepala desa dan ia memerintah selama sepuluh tahun. Namun demikian, kekuasaan kepala desa ini sering ditantang karena ia tidak berasal dari keluarga aristokrat. Awal pelaksanaan suksesi itu tidaklah berjalan mulus seperti yang diharapkan.

Sementara itu, perubahan politik lokal telah mempengaruhi pengelolaan Hutan Setulang. Sekarang masyarakat biasa dapat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan dan mereka memiliki peluang lebih besar untuk menggunakan hutan dengan izin dari BPHTOS.

Larangan berdasarkan Hukum Adat Setulang meliputi pemotongan dan penggergajian kayu di hutan. Juga larangan perusahaan penebangan kayu dan peraturan terhadap perluasan kebun dalam hutan ada. Aturan ini juga menegaskan bahwa Masyarakat Setulang tidak akan membiarkan eksploitasi hutan yang tidak berkelanjutan wilayah adat mereka.

Hutan Setulang memiliki peranan yang penting bagi kehidupan penduduk setempat. Bagi anak-anak dan remaja, hutan adat adalah tempat untuk rekreasi, berenang dan berkemah selama musim liburan sekolah. Bagi wanita dewasa, hutan adalah sumber air, makanan dan kayu bakar untuk keperluan rumah tangga. Masyarakat juga dibolehkan berburu babi hutan dan menggunakan kayu untuk membuat perahu panjang dan membangun rumah.

2. Konflik dengan perusahaan kayu

Gerakan untuk melindungi Hutan Setulang semakin kuat di awal periode desentralisasi. Beberapa perusahaan kayu datang dan menawarkan kerjasama untuk mengeksploitasi Hutan Setulang. Beberapa Penduduk Senior Dayak Kenyah yang pernah mengalami bekerja di Malaysia, telah melihat kondisi rusaknya hutan yang telah ditebang dan tidak melihat manfaat yang nyata bagi penduduk desa-desa sekitar hutan. Perspektif untuk mempertahankan Hutan Setulang mendapat dukungan dari *Center for International Forestry Research* (CIFOR). Setelah beberapa diskusi hangat, penduduk desa memutuskan untuk menjaga hutan mereka. Akibatnya, konflik langsung dengan perusahaan kayu tidak bisa dihindari.

Sebenarnya, konflik di Kalimantan telah terjadi sejak tahun 1970-an, terutama setelah pemerintah pusat mengizinkan perusahaan swasta untuk berinvestasi dalam penebangan pada 1970-an. Reformasi di Indonesia yang diikuti desentralisasi pada tahun 2001 diikuti dengan makin meningkatnya upaya untuk menegaskan kontrol atas tanah (Anau *et.al.*, 2002). Beberapa kelompok suku mengklaim hutan adat dan memutuskan untuk menjualnya kepada perusahaan penebangan.

Desa Setulang juga menerima tawaran dari perusahaan kayu saat itu dan beberapa Orang Setulang yang mendukung pembangunan hampir berhasil menjual hutan. Mereka ditawarkan sekitar Rp. 30.000-75.000 per meter kubik kayu (Kompas, 2003). Pada tahun 1974, dua perusahaan kayu beroperasi di dekat Hutan Setulang: PT. Trang Jaya Nugraha di Setarap dan PT. Sanjung Makmur di Sentaban. Kegiatan kedua perusahaan menyebabkan air di Sungai Setulang menjadi keruh. Masuknya perusahaan kayu berarti desa harus mencari hutan pengganti untuk bahan bangunan mereka. Akhirnya Masyarakat Setulang menolak kerjasama dari pengusaha Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu (IPPK), yang datang menjanjikan segala macam bantuan.

Selama awal desentralisasi tahun (2000-2002) delapan perusahaan kayu datang ke Desa Setulang resmi menawarkan usaha patungan dengan masyarakat setempat untuk penebangan kayu di Hulu Sungai Setulang. Kadang Masyarakat Setulang harus berurusan dengan polisi sebagai konsekuensi dari penolakan.

Pada saat penelitian lapangan dilakukan, Hutan Setulang masih tetap memiliki kondisi yang baik. Dalam prosesnya Penduduk Setulang sempat mendapatkan Kalpataru pada tahun 2003 yang diserahkan oleh Presiden RI.

D. Faktor yang Mempengaruhi

Berdasarkan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan hukum adat dan pengamatan di Desa Setulang dan Desa Sesaot dan pengumpulan dokumen dan data statistik, terdapat lima faktor yang berpengaruh terhadap pemberlakuan hukum adat di dalam pengelolaan hutan. Lima faktor tersebut adalah: kohesivitas, hubungan kekerabatan yang dekat, adanya dukungan dari berbagai pihak, kejelasan hak atas hutan, transparansi dan akuntabilitas khususnya keuangan.

1. Kohesivitas

Kohesivitas merupakan komponen penting dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Sebuah studi di Amazon juga telah mengidentifikasi hal yang sama (Schwartzman, dan Zimmerman, 2005). Diantara kasus Desa Sesaot dan Desa Setulang, Masyarakat Setulang menunjukkan adanya kohesivitas yang lebih memadai, sehingga mereka berhasil mencapai kesepakatan untuk mempertahankan Hutan Setulang (lihat Bagian C2. Konflik dengan Perusahaan Kayu). Kepentingan yang berbeda antara orang-orang muda dan tua atau antara bangsawan dan rakyat biasa serta antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan berhasil diakomodasi dalam satu kesepakatan. Terkait hal ini, orang dayak Kenyah memang memegang tradisi untuk mewariskan hutan kepada generasi mendatang.

Masyarakat Sesaot, awalnya dapat mencapai kesepakatan mengaplikasikan *Awig-awig* dalam pengelolaan agroforestri dan perlindungan hutan. Namun berangsur-angsur menjadi lemah seiring dengan protes dari masyarakat yang merasa dirugikan, karena melanggar *Awig-awig*. Sementara itu, dukungan institusi melemah karena merasa tugas pokok dan fungsi perlindungan hutan yang seharusnya menjadi tugas mereka telah tergantikan oleh masyarakat dengan hukum *Awig-awig*nya (Lihat Bagian B. *Awig-Awig* dalam Mengelola dan Melindungi Hutan Sesaot)

2. Hubungan kekerabatan

Masyarakat adat telah memanfaatkan hubungan

kekerabatan dalam pemberlakuan hukum adat untuk pengelolaan dan perlindungan hutan. Hubungan kekerabatan di Indonesia sering memegang peranan penting dalam mengakses informasi. Masyarakat Setulang mempertahankan hubungan dekat dengan pejabat Kabupaten Malinau (Wollenberg, 2006). Pada saat penelitian dilakukan, Marthin Billa (Bupati Malinau) adalah Orang Dayak Kenyah yang lahir di Apo Kayan dan memiliki beberapa kerabat yang tinggal di Desa Setulang. Latar belakang etnis memastikan hubungan yang erat antara Bupati dan Desa Setulang. Hubungan dekat ini juga didukung oleh fakta bahwa beberapa orang yang bekerja tetap atau tidak tetap di kantor kabupaten dan di kantor lembaga donor seperti CIFOR-Malinau juga kerabat dari Desa Setulang. Kekerabatan ini membuat Orang Setulang dapat lebih mudah mengakses informasi dan melakukan konsultasi tentang pendanaan dan proyek-proyek pembangunan dari Pemerintah. Hubungan erat antara pemerintah kabupaten dan masyarakat Setulang juga menyebabkan daya tawar yang lebih dalam berurusan dengan pengelolaan Hutan Setulang dan pelaksanaan kegiatan adat.

Pada kasus Masyarakat Sasak di Sesaot, jelas sekali terlihat kurangnya ikatan kekerabatan antara masyarakat dengan para pejabat di pemerintahan daerah. Berdasarkan pengamatan di lapangan, para pejabat Pemda Tingkat I dan II berasal dari suku yang beragam, misalnya Sasak, Sumbawa dan Jawa. Akibatnya rasa keterikatan dengan adat (*Awig-awig*) juga kurang kuat, karena perbedaan suku dan kebiasaan.

3. Dukungan berbagai pihak

Dukungan para pihak dalam pemberlakuan adat dalam pengelolaan hutan merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat Setulang mendapat dukungan kuat dari sebuah lembaga penelitian internasional, seperti CIFOR. Dukungan termasuk dalam bentuk dana dan pembangunan fasilitas rekreasi (Lihat Bagian C2. Konflik dengan Perusahaan Kayu).

Di lain pihak, pelaksanaan *Awig-awig* di Sesaot pada awalnya juga didukung banyak pihak (Lihat Bagian B. *Awig-Awig* dalam Mengelola dan Melindungi Hutan Sesaot). Namun demikian, KMPH yang mempelopori *Awig-awig* akhirnya kehilangan dukungan dari masyarakat dan pemerintah provinsi. Lebih lebih setelah pengelola

Hutan Sesaot berubah dari pemerintah provinsi menjadi pemerintah kabupaten. Hilangnya dukungan dana, akses informasi dan keberadaan hukum adat, otomatis memperlemah pemberlakuan hukum adat, *Awig-awig*.

4. Kejelasan hak kepemilikan lahan hutan

Permasalahan ketidakjelasan hak masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan di Indonesia memang bukan hal baru. Konflik-konflik lahan hutan sering terdengar di berbagai tempat. Hal yang sama terjadi di Desa Sesaot dan Desa Setulang.

Berbeda dengan Hutan Sesaot yang sejak awal telah dieksploitasi oleh pengusaha kayu, Hutan Setulang belum dieksploitasi dan secara historis merupakan warisan para leluhur Orang Setulang. Hal ini menjelaskan mengapa Masyarakat Setulang lebih gigih menuntut hak kepemilikan dan pengelolaan terhadap Hutan Setulang. Orang Setulang juga memiliki kekawatiran akan kelestarian Hutan Setulang.

Masyarakat Setulang khawatir bahwa suatu saat pemerintah daerah (kecamatan dan kabupaten) akan membuat keputusan tentang pemanfaatan hutan adat mereka tanpa mengikutsertakan Masyarakat Setulang dalam proses pengambilan keputusan (komunikasi dengan tokoh Desa Setulang). Mereka khawatir bahwa akan terjadi pembangunan perkebunan kelapa sawit atau penebangan pohon di wilayah hutan adat mereka, sebagaimana banyak terjadi disekitar mereka. Kurangnya kejelasan hak kepemilikan lahan ini berpotensi menjadi penghambat usaha pemberlakuan hukum adat untuk melindungi dan mengelola Hutan Setulang.

5. Transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen yang juga tak kalah penting dalam tata kelola hutan yang baik. Tidak itu saja, faktor ini ternyata juga penting dalam proses pemberlakuan peraturan adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan.

Bagi masyarakat Setulang, transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang seharusnya dilakukan para pihak terkait (komunikasi dengan seorang tokoh di Desa Setulang). Pembelajaran mengenai akibat dari ketidaktransparanan dan kurangnya akuntabilitas didapat dari pengalaman masyarakat di sekitar mereka. Dalam sebuah kasus, Inhutani II, sebuah perusahaan kayu milik negara, dituntut untuk membayar 50 miliar rupiah terhadap tuntutan

masyarakat yang hutan adatnya ditebang. Setelah negosiasi tuntutan dikurangi menjadi 2,5 miliar rupiah. Inhutani II membayar 2,5 miliar rupiah untuk sekitar 50 rumah tangga. Setiap rumah tangga seharusnya mendapatkan 400 juta rupiah, tapi akhirnya, masing-masing hanya menerima sekitar 200 ribu rupiah. Sebuah hasil penelitian di tiga desa di Kabupaten Malinau menemukan bahwa hampir 50 persen responden merasa bahwa ekonomi mereka telah menurun setelah perusahaan penebangan skala kecil (IPPK) beroperasi dibandingkan sebelum masuknya IPPK (Affandi, 2006).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa hukum adat merupakan bagian dari kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Hukum adat memiliki potensi untuk mengelola dan melindungi hutan secara lestari. Pengelolaan dan perlindungan hutan secara adat bersifat lebih fleksibel dan umumnya dilakukan melalui musyawarah. *Awig-awig* dan hukum adat Orang Setulang (Suku Dayak Kenyah) sama-sama efektif untuk melindungi hutan, namun seiring berjalan waktu *Awig-awig* kehilangan dukungan dari pemerintah dan sebagian masyarakat setempat. Karena itu, perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi pemberlakuan hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan yaitu kohesivitas, dukungan pihak terkait yaitu pemerintah, LSM dan donor, ikatan kekerabatan, kejelasan hak atas hutan, transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam bidang keuangan.

Mengingat pentingnya hukum adat, penelitian ini menyarankan kepada pihak-pihak terkait yaitu pemerintah, LSM, akademisi dan donor: pertama, dilakukan pemetaan dan inventarisasi masyarakat lokal yang mengaplikasikan hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Kedua, pemerintah segera menyelesaikan dan mensahkan RUU tentang hutan adat; ketiga, pemerintah seharusnya memberikan dukungan dan insentif kepada masyarakat adat Desa Sesaot dan Setulang dalam usahanya melindungi hutan. Terakhir, pentingnya meningkatkan kolaborasi masyarakat lokal dengan Pemda dalam mempertahankan warisan hukum adat. Dalam hal ini, Pemda dapat memberi dukungan dana dan memfasilitasi

pembinaan terhadap masyarakat adat. Sementara itu, untuk membenahi transparansi dan akuntabilitas keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan hutan dapat dilakukan dengan cara membuat laporan dan evaluasi secara berkala yang diinformasikan kepada semua pihak terkait. Bahkan penting pula dilakukan audit jika memang diperlukan.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Colin Filer, Dr. David Lawrence, Dr. Lesley Potter dan Dr. Budy Resosudarmo dari Australian National University serta Profesor Carunia Firdausy dari LIPI yang telah memberi bimbingan dan masukan selama melakukan penelitian atau penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

Acciaioli, G. 2006. *Environmentality Reconsidered: Indigenous to Lore Lindu Conservation Strategies and the Reclaiming of the Commons in Central Sulawesi, Indonesia*. Dalam: Anonim (Ed). *Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities*, the Eleventh Conference of the International Association for the Study of Common Property. Bali, 19-23 June. Indiana University: Digital Library of Commons.

Affandi, O. 2006. *The Impact of IPPK and IUPHHK on Community Economies in Malinau District*. Governance Brief (May 2006): 1-5.

Apomfires, F.F. 1998. *Perubahan Institusi Adat dan Kerusakan Hutan Kasus pada Masyarakat Adat Sentani, Irian Jaya*. Tesis Magister. Universitas Indonesia. Jakarta. 195 halaman.

Anau, N., R. Iwan, M. van Heist, G. Limberg, M. Sudana and E. Wollenbergh. 2002. *Technical Report Phase I 1997-2001: ITTO Project Pd 12/97 Rev.1*. Bogor: Centre for International Forestry Research (CIFOR).

Assambe-Mvondo, 2010. *The Customary Law Nature of Sustainable Forest management States Practice in Central America and*

European Union. Forest Ecology and Management 3(2):58-70.

Ayuthaya, P.N.N., 1996. *Community Forestry and Watershed Networks in Northern Thailand. Prosiding Seeing Forests for Trees: Environment and Environmentalism in Thailand*. Chiang Mai. Silkworm Books.

Badan Pusat Statistik Indonesia, *Sensus Penduduk Tahun 2000*.

Badan Pusat Statistik Indonesia, *Survey Potensial Desa 2005*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau, 2006. *Kecamatan Malinau Selatan Dalam Angka 2004*. Malinau. Malinau: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat, 2003. *Narmada dalam Angka*. Narmada: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat.

Contreras-Hermosilla, A. and C. Fay, 2005. *Strengthening Forest Management in Indonesia through Land Tenure Reform: Issues and Framework*. Bogor: Forest Trends.

Departement Van Economische Zaken, 1935. *Census of 1930 in the Netherlands Indies: Volume IV, Native Population in Sumatera*. Batavia: Departement Van Economische Zaken.

Eghenter, C., 2000. *What Is Tana Ulen Good For? Considerations on Indigenous Forest Management, Conservation, and Research in the Interior of Indonesian Borneo*. *Human Ecology* 28(3): 331-357.

Gautama, I. 2008. *Studi Komplain Kepemilikan Hutan Adat Masyarakat di Daerah Aliran Sungai Kabupaten Luwu Timur*. *J. Agrisains* 9(2):96-104.

ICRAF (World Agroforestry Centre) dan KPSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan), 2001. *Inisiatif dan Kebijakan Yang Berhubungan dengan Hak-Hak Masyarakat Adat: Kedai III Diselenggarakan Bersama oleh ICRAF dan KPSHK, Crawford Lodge, Bogor, 21 November 2000*. Bogor: World Agroforestry Centre - ICRAF,

- SEA Regional Office. <http://www.worldagroforestrycentre.org/sea/Publications/files/book/BK0021-04.PDF>, diakses 27 Januari 2008.
- ICRAF (World Agroforestry Centre), KPSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) and JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif), 2001. Kelembagaan Masyarakat Adat dalam Mengelola Sumber Daya Hutan: Kedai II Diselenggarakan Bersama Oleh ICRAF, KPSHK, dan JKPP, Crawford Lodge, Bogor, September 2000. Bogor: World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office. (<http://www.worldagroforestrycentre.org/sea/Publications/files/book/BK0023-04.PDF>), diakses 27 Januari 2008.
- Kementerian Kehutanan, 1997. Peta Vegetasi Indonesia. http://www.dephut.go.id/Halaman/Peta%20Tematik/PL&Veg/veg_97/vgindo.gif. Diakses 18 Februari 2013.
- Kementerian Kehutanan, 2011. *Data Strategis Kehutanan 2012*. Jakarta: Kementerian Kehutanan.
- KMPH (Kelompok Mitra Pelestari Hutan) Sesaot, 2000. Proposal Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan: KMPH Sesaot, Desa Batu Mekar, Sesaot, Lebah Sempage dan Sedau. Mataram: KMPH.
- Kompas, 2003. Warga Setulang Menolak Penebangan Hutan Adat. *Kompas*, 3 November.
- Mulyoutami, E, R. Rismawan, L. Joshi, 2009. Local knowledge and management of Simpukng (forest gardens) among the Dayak people in East Kalimantan, Indonesia. *Forest Ecology and Management* 257(2009): 2054-2061.
- Schwartzman, S. dan B. Zimmerman, 2005. Conservation Alliances with Indigenous People of the Amazon. *Conservation Biology* 19(3): 721-727.
- Sembiring, S. and E. Effendi (eds), 1999. *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law.
- Sidiyasa, K., Zakaria and I. Ramses, 2006. *The Forest of Setulang and Sengayan in Malinau East Kalimantan*. Bogor. Centre for International Forestry Research (CIFOR).
- Suryadi, S., 1998. Partnership Association for Forest Protection and Management: Breaking Ground for Community-Based Management in the Sesaot Protected Forest Area Crossing Boundaries, the Seventh Annual Conference of the International Association for the Study of Common Property. Vancouver, British Columbia, Canada, 10-14 June: Indiana University: Digital Library of Commons.
- Suryadi, 2001. Enabling Policy Frameworks for Successful Community Based Resource Management Initiatives. Dalam K. Suryanata, G. Dolcemascolo, R. Fisher and J. Fox (eds) *Prosiding Eighth Workshop on Community Management of Forest Land*. Hawaii: East West Center and Regional Forestry Training Center.
- Sutedjo, E.B dan Suryadi, 1997. Government and NGO Collaboration in Social Forestry Development in Protected Areas: A Case Study from Sesaot, West Lombok, Indonesia. Dalam M. Victor, C. Lang and J. Bornemeir (eds). *Community Forestry at Crossroads: Reflections and Future Directions in the Development of Community Forestry*, Vol. 16. Bangkok: RECOFT.
- Wollenberg, E., M. Moeliono, G. Limberg, I. R. S. Rhee and M. Sudana, 2006. Between State and Society: Local Governance of Forest in Malinau, Indonesia. *Forest Policy and Economics* 2006(8): 421-433.